

## ABSTRAK

Eligio Ildefiano de Carvalho, 19.75.6552. **Mengkritisi Kebijakan Perekrutan Mahasiswa di Timor-Leste dari Perspektif Teori Keadilan John Rawls**. Skripsi. Program Studi Sarjana Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. 2023.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk (1) mengulas kebijakan perekrutan mahasiswa yang terjadi di Timor-Leste pada Universitas Nasional Timor Lorosa'e; dan (2) mengkritisi kebijakan perekrutan mahasiswa di Timor-Leste dengan menggunakan teori keadilan John Rawls sebagai standar penilaian. Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif, di mana penulis mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan juga wawancara para tokoh masyarakat dan politik di Timor-Leste. Objek yang diteliti adalah persoalan kebijakan perekrutan mahasiswa yang terjadi di Timor-Leste.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa kebijakan perekrutan mahasiswa yang terjadi di Timor-Leste merupakan salah satu program pemerintah yang diciptakan dengan tujuan untuk membangun dan meningkatkan sumber daya manusia. Hal ini bisa dilihat dari tujuan kebijakan yaitu memberikan kesempatan kepada generasi muda di Timor untuk menimba ilmu pengetahuan atau mengakses pendidikan di Universitas Nasional Timor Lorosa'e; dan kedua, meningkatkan sumber daya manusia demi mendukung pembangunan bangsa dan negara. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut problematis karena tidak mematuhi kriteria dan tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan. Rezim spesial yang diberi kewenangan untuk mengimplementasikan kebijakan ini tampaknya mengabaikan kriteria dan prosedur yang ditetapkan dan sekaligus memberikan prioritas kepada anak-anak dari golongan tertentu yaitu kaum veteran dan keluarga miskin.

Kalau dibaca dari perspektif teori keadilan John Rawls, penerapan kebijakan tersebut sangat tidak adil karena tidak memenuhi kedua prinsip keadilan yang ditetapkan oleh Rawls, yaitu prinsip hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasarnya dan juga prinsip perbedaan. Terkait prinsip pertama, hak dasar semua warga negara, terutama generasi untuk mendapatkan pendidikan yang layak tidak dijamin karena adanya diskriminasi dalam perekrutan. Kesempatan yang sama tidak diberikan kepada semua generasi muda untuk mengakses pendidikan. Berkaitan dengan prinsip perbedaan yang menegaskan bahwa perbedaan sosial-ekonomi di antara ditolerir sejauh ada sistem yang mengatur agar perbedaan tersebut menguntungkan negara secara keseluruhan dan terutama orang miskin pada khusus, diakui bahwa kebijakan perekrutan mahasiswa merupakan salah satu cara yang diciptakan negara untuk mengatasi kesenjangan pendidikan. Tetapi, sistem yang bagus tersebut tidak diimplementasikan secara baik dan benar sehingga menciptakan ketidakadilan.

**Kata Kunci: Kebijakan Perekrutan, Keadilan, John Rawls, Kebebasan, dan Hak Partisipasi.**

## ABSTRACT

Eligio Ildéfiano de Carvalho, 19.75.6552. **Criticizing Student Recruitment Policy in Timor Leste by the Perspective of John Rawls' Theory of Justice.** Thesis. Philosophy Study Program, Ledalero Institute of Philosophy and Creative Technology. 2023.

The aims of this thesis to (1) review the student recruitment policies that occur in Timor-Leste at the National University of Timor Lorosa'e; and (2) criticizing the student recruitment policy in Timor-Leste by using John Rawls's theory of justice as a standard of evaluation. The method used in this writing is descriptive qualitative, in which the author describes the data obtained from literature studies and also interviews with community and political leaders in Timor-Leste. The object under study is the issue of student recruitment policies that occurred in Timor-Leste.

Based on the results of this research, the author found that the student recruitment policy in Timor-Leste is one of the government programs created with the aim of developing and improving human resources. This can be seen from the policy objectives, which are to provide opportunities for the younger generation in Timor to gain knowledge or access education at the National University of East Timor; and secondly, to improve human resources to support the development of the nation and state. However, the facts on the ground show that the policy is problematic because it does not comply with the criteria and does not follow the established procedures. The special regime that was authorized to implement this policy seems to have ignored the criteria and procedures and at the same time gave priority to children from certain groups, namely veterans and poor families.

If read from the perspective of John Rawls' theory of justice, the implementation of this policy is very unfair because it does not fulfill the two principles of justice set by Rawls, namely the principle of equal rights to basic liberties and also the principle of difference. Regarding the first principle, the basic right of all citizens, especially the younger generation, to get a proper education is not guaranteed due to discrimination in recruitment. Equal opportunities are not given to all young people to access education. In connection with the principle of difference which emphasizes that socio-economic differences between are tolerated insofar as there is a system that regulates that these differences benefit the country as a whole and especially the poor in particular, it is recognized that student recruitment policies are one of the ways created by the state to overcome educational disparities. However, this good system is not implemented properly and correctly, thus creating injustice.

**Keywords: Recruitment Policy, Justice, John Rawls, Freedom, and Participation Rights.**